
**PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN GOOD GOVERNANCE
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN****Oleh****Putri Dwi Rahmadani¹, Nurfitri Zulaika²**^{1,2}STIE Pembangunan Tanjungpinang**E-mail:** ¹putridwirahmadanipdr@gmail.com, ²NurfitriZulaika@gmail.com

Article History:*Received: 02-11-2022**Revised: 18-12-2022**Accepted: 29-12-2022***Keywords: :***Standar Akuntansi**Pemerintahan,**Kompetensi Sumber Daya**Manusia, Good**Governance, Kualitas**Laporan Keuangan,**Sistem Pengendalian**Internal.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan staf penatausahaan keuangan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 123 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi dengan variabel moderating yang diolah dengan bantuan program SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating serta good governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating

PENDAHULUAN

Munculnya paradigma baru pada pengelolaan keuangan daerah memicu timbulnya tuntutan dari masyarakat akan adanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel,

dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan ialah perubahan mendasar dalam konsep financial administration menjadi financial management, semangat melandasi pengelolaan keuangan adalah let the managers manage dan konsep pengendalian keuangan negara yaitu check and balance mechanism (Trisulo, 2017)¹. Instrumen pelaporan pada paradigma baru ini harus didukung tersedianya lampiran atas laporan keuangan dan akan dipertanggungjawabkan dan dievaluasi dengan diberlakukannya audit oleh eksternal auditor terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian selama sebelas kali berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan 2021. Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam menyajikan Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi, dan evaluasi kinerja (Pebriani, 2019)². Menurut Aminy et al. (2021)³ pengelolaan keuangan negara harus sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, dimana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan harus diterapkan tata kelola keuangan dengan baik dan benar.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Aminy et al. (2021) mengemukakan good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara (state), sektor swasta, dan masyarakat (society). Berdasarkan hasil penelitian Azlim et al. (2012)⁴ membuktikan bahwa penerapan good governance mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dijadikan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dengan diterapkan good governance diharapkan dapat berimplikasi pada tata kelola keuangan daerah, sehingga mampu menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (Farikhoh, 2019).

Dengan ditemukannya beberapa research gap peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia, dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan serta bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memoderasi pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan good governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk itu peneliti merumuskan judul penelitian "Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating"

LANDASAN TEORI**Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan laporan keuangan ialah laporan yang tersistematis mengenai transaksi-transaksi dan posisi keuangan yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan. Laporan keuangan terbagi atas budgetary report (laporan pelaksanaan anggaran) dan laporan finansial.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selama satu periode pelaporan. Secara khusus tujuan pelaporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang digunakan. Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada (Mulia, 2019)⁵

Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan akuntansi pemerintahan. Dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah disepakati, maka laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Putu et al., 2014).⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berbasis akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan LO, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam anggaran negara/daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan harus memiliki pengetahuan yang luas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki keterampilan yang bagus, sikap yang baik dan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas (Wulandari, 2018).

Good Governance

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan Good Governance pada dokumen yang berjudul "Governance for Sustainable Human Development, January 1997" sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Istilah ini sering disebut dengan pemerintahan yang baik

Good Governance adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2016)⁷. Sementara menurut Junyantara & Samtika Putra (2021)⁸ tata kelola pemerintah yang baik yaitu tata kelola yang dilakukan secara transparan dari proses penyusunan laporan keuangan, proses pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang disusun.

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Ferri et al, (2020)⁹ Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang dilaksanakan Kepala Daerah atau kepala instansi yang digunakan untuk memberikan kepastian dalam pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung ke sumber utama. Menurut Sugiyono (2019)¹⁰ data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan untuk kualitatif) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam memperoleh data primer peneliti menerapkan teknik pengumpulan data dengan teknik penyebaran kuesioner (angket) kepada responden yang dituju. Kuesioner (angket) merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu berjumlah 41 SKPD terdiri dari 22 (dua puluh dua) Dinas, 7 (tujuh) Badan, 2 (dua) Rumah Sakit, 9 (sembilan) Biro, dan Sekretariat. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini kriteria sampel yang ditetapkan adalah pegawai SKPD di Provinsi Kepulauan Riau yang terlibat langsung dengan pengelola laporan keuangan. Yaitu tiga orang tiap SKPD terdiri dari PPK, bendahara dan staf penatausahaan keuangan sebanyak 123 responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi variabel dari 123 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SAP	123	36	55	47,44	4,664
Kompetensi SDM	123	21	40	34,37	4,350
Good Governance	123	54	90	76,02	8,471
Kualitas Laporan Keuangan	123	12	20	17,10	1,720
Sistem Pengendalian Internal	123	30	45	39,90	3,143
Valid N (listwise)	123				

Berdasarkan tabel, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan nilai minimum sebesar 36, nilai maksimum sebesar 55, mean sebesar 47,44 dengan standar deviasi sebesar 4,664. Dari data tersebut responden menjawab pada kisaran 4 dan beberapa 3 dan 5 dengan demikian untuk variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki jawaban bervariasi. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel kompetensi Sumber Daya Manusia menunjukkan nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 40, mean sebesar 34,37 dengan standar deviasi sebesar 4,350. Dari data tersebut responden menjawab pada kisaran 4 dan 71 beberapa 5, 3 dan 2 dengan demikian untuk variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki jawaban bervariasi.

Variabel Good Governance menunjukkan nilai minimum sebesar 54, nilai maksimum sebesar 90, mean sebesar 76,02 dengan standar deviasi sebesar 8,471. Dari data tersebut responden menjawab pada kisaran 4 dan beberapa 5, 3 dan 2 dengan demikian untuk variabel Good Governance memiliki jawaban bervariasi. Kemudian variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, mean sebesar 17,10 dengan standar deviasi sebesar 1,720. Dari data tersebut responden menjawab pada kisaran 4 dan beberapa 5 dan 3 dengan demikian untuk variabel kualitas laporan keuangan memiliki jawaban bervariasi.

Untuk variabel Sistem Pengendalian Internal menunjukkan nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 45, mean sebesar 39,90 dengan standar deviasi sebesar 3,143. Dari data tersebut responden menjawab pada kisaran 4 dan beberapa 5, 3, 2 dan 1 dengan demikian untuk variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki jawaban bervariasi. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel Good Governance sebesar 76,02 sedangkan terendah pada variabel kualitas laporan

keuangan sebesar 17,10. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel Good Governance sebesar 8,471 dan terendah pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 1,720.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan hasil t hitung sebesar 5,476 lebih besar dari t tabel yaitu 1,980 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang digunakan yaitu $\alpha = 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dengan baik maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sesuai dengan tujuan dari adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggungjawabkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Jika Standar Akuntansi Pemerintahan tidak ada maka dapat menimbulkan implikasi negative seperti rendahnya realibilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta dapat menyulitkan pemeriksaan. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dan prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan serta sebagai dasar auditor dalam melakukan pemeriksaan.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil pengujian menggunakan analisis linier berganda menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Keputusan ini didasarkan pada hasil t hitung sebesar 12,421 lebih besar dari t tabel yaitu 1,980 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang digunakan yaitu $\alpha = 0,05$. Kemudian berdasarkan nilai koefisien regresi senilai 0,249 dapat diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan juga kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh lebih besar dibanding variabel independen lainnya terhadap kualitas laporan keuangan yang didasari dari nilai koefisien regresi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan apabila kompetensi sumber daya manusia berkualitas maka laporan keuangan yang dihasilkan juga berkualitas.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang artinya Good Governance berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat good governance, maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini Sistem Pengendalian Internal memoderasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini

menggambarkan bahwa interaksi Sistem Pengendalian Internal dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal mampu memperkuat pola hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

KESIMPULAN

Penelitian ini hanya berupa kuesioner yang memiliki kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban responden yang menjawab pernyataan yang ada di dalam kuesioner sesuai persepsi masing-masing individu yang bersifat subyektif dan mungkin tidak didasari pengetahuan yang mendalam terkait pernyataan tersebut sehingga mengakibatkan hasil dari penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden. Variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya tiga variabel bebas yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi Sumber daya manusia dan good governance. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, simpulan, dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran dari penelitian ini antara lain, Bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memaksimalkan sistem informasi yang ada seperti website untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempublikasikan informasi kepada publik dan juga sebagai wadah menampung aspirasi publik. Penelitian ini masih perlu dikaji lebih mendalam mengenai variabelvariabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian yang terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi Sumber Daya Manusia, good governance terhadap kualitas laporan keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Trisulo. (2017). Beberapa Konsep Keuangan Negara dalam Tata Cara Pembayaran Menggunakan APBN Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012.
- [2] Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55. <https://doi.org/10.36982>
- [3] Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum se-Nusa Tenggara Barat). *Valid Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.35748>
- [4] Azlim, Dawarnis, & Abu Bakar, U. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Bada Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 1–14.
- [5] Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.24014>
- [6] Putu, N., Merta, Y., Sari, M., Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2014). (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). 2(1).
- [7] Anggara, S. (2016). Ilmu Adminsitrasi Negara. In Cv Pustaka Setia
- [8] Junyantara, I. G., & Samtika Putra, I. P. D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, Good Governance, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar

- [9] Ferri, S., Rahayu, S., & Yudi. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 5(4), 268–279.
- [10] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (Edisi Kedua). ALFABETA.